

ANALISIS FAKTOR PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

Fityatil Hindayani¹, Yesi Novita² Laili Huriyati³

^{1,2,3} Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, NTB.

Correspondent Author : lailihurriati.86@gmail.com

Abstract

Poverty today extends far beyond just economic deprivation or reduced income, encompassing broader social and developmental dimensions. In West Nusa Tenggara (NTB), economic growth is shaped not only by infrastructure development but also by factors such as poverty levels, the Human Development Index (HDI), population size, and more. Rural areas classified as Disadvantaged, Frontier, and Outermost (3T) face pronounced poverty challenges. Research from 2024 reveals that rising social income inequality across Indonesia results in uneven distribution of economic growth benefits. In NTB, poverty is exacerbated by limited resources, and restricted access to education and employment opportunities. Addressing poverty in NTB therefore calls for a strategic approach focused on improving access to essential resources, quality education, and sustainable employment. The NTB Provincial Government has launched various poverty alleviation programs to tackle these issues, incorporating local initiatives and community-driven solutions. By emphasizing strategies such as acceleration, innovation, and the development of superior local commodities, these programs aim to produce a transformative impact. This approach not only improves community quality of life but also promotes sustainable regional growth. Achieving reduced poverty rates in NTB depends on effectively implementing these programs, which hold the potential to foster long-term economic resilience and uplift underserved communities.

Keywords: Poverty, Social inequality, Economic growth, Unemployment

Abstrak

Kemiskinan saat ini tidak hanya terbatas pada kemiskinan ekonomi atau pendapatan yang rendah, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan pembangunan yang lebih luas. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan lain-lain. Daerah pedesaan yang tergolong Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menghadapi tantangan kemiskinan yang nyata. Riset tahun 2024 mengungkap bahwa meningkatnya ketimpangan pendapatan sosial di seluruh Indonesia mengakibatkan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Di NTB, kemiskinan diperparah oleh keterbatasan sumber daya, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan di NTB memerlukan pendekatan strategis yang berfokus pada peningkatan akses terhadap sumber daya penting, pendidikan berkualitas, dan lapangan kerja yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi NTB telah meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan untuk mengatasi masalah ini, dengan menggabungkan inisiatif lokal dan solusi berbasis masyarakat. Dengan menekankan strategi seperti percepatan, inovasi, dan pengembangan komoditas lokal unggulan, program-program ini bertujuan untuk menghasilkan dampak transformatif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan. Pencapaian penurunan angka kemiskinan di NTB bergantung pada pelaksanaan program-program ini secara efektif, yang berpotensi untuk menumbuhkan ketahanan ekonomi jangka panjang dan mengangkat masyarakat yang kurang terlayani.

Kata Kunci: Kemiskinan, Ketimpangan sosial, Pertumbuhan ekonomi, pengangguran.

Pendahuluan

Nusa Tenggara Barat merupakan pusat Pariwisata dengan permasalahan kemiskinan yang menjadi perhatian utama. Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai banyak sumber daya alam yang sangat mudah sekali untuk kita jumpai dan lokasi yang sangat strategis. (Gabriela & Utomo, 2023) Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu wilayah atau daerah, memiliki mata pencaharian tetap di daerah tersebut, serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Hal ini didukung oleh teori Stakeholder, yang berasumsi bahwa pihak berkepentingan terhadap organisasi memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi keputusan pengguna sumber-sumber ekonomi yang digunakan. Namun, masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan masih menjadi tantangan besar. Negara berkembang sering menghadapi masalah-masalah ini karena berfokus pada industri dan potensi pasar yang terus mengalami perkembangan. (Anugrah & Hasri, 2024)

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 282.477.584 jiwa (Kemendagri) dengan 38 provinsi. Penelitian yang dilakukan pada 2024 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan semakin meningkat di berbagai wilayah Indonesia, sehingga manfaat pertumbuhan sosial ekonomi belum dinikmati secara menyeluruh, terutama di wilayah pedesaan. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering mengalami berbagai masalah gizi, kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang tidak layak, dan keterbatasan akses. (Koja et al., 2024)

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi NTB untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, secara umum telah menampakkan keberhasilan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB. Dari tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tercatat sebesar 17,25 %. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB terus mengalami peningkatan hingga mencapai 12,91% pada tahun 2024. (Hardiani, 2013) Data rasio gini Indonesia dari tahun 2013 hingga 2024 menunjukkan penurunan signifikan, terutama pada tahun 2020. Dengan adanya pengambilan keputusan pemerintah di harapkan dapat membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang

tepat mengenai pengeloaan keuangan daerah supaya sesuai dengan sumber daya dan ekonomi yang ada di wilayah masyarakat NTB. (Anugrah & Hasri, 2024)

Pemahaman mengenai kemiskinan, termasuk cara pengukurannya, terus meningkat Khususnya pada kemiskinan di daerah pedesaan, menyatakan bahwa kemiskinan adalah klaster dari berbagai kondisi yang saling berkaitan, yang membuat seseorang terperangkap dalam kondisi kurang menguntungkan dan sulit keluar dari kemiskinan. Kondisi-kondisi ini meliputi kelemahan fisik, kerentanan terhadap guncangan, keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kemiskinan itu sendiri. (Aneja et al., 2024)

Definisi kemiskinan ini tidak hanya terbatas dari aspek ekonomi maupun penurunan pendapatan semata, akan tetapi mencakup aspek yang semakin lebih luas. Pertumbuhan ekonomi di NTB dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Provinsi NTB mengalami kemajuan, (Nakyah, Fitratul, Muhammad Alwi, 2024) keterbelakangan karena tingkat pendidikan yang rendah, dan penduduk perempuan usia kerja memilih untuk menjadi pekerja rumahan/tidak dibayar (IRT). (Hardinandar, 2019). Pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat miskin sulit keluar dari kemiskinan, meskipun kemajuan keuangan diharapkan dapat mengurangi pengangguran. Pendidikan penduduk perempuan seharusnya menjadi lebih fokus utama yang diperbaiki. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan ukuran perkembangan ekonomi suatu negara, karena peningkatan elemen produksi baik dari segi kuantitas maupun kualitas akan meningkatkan kapasitas negara untuk menghasilkan produk dan layanan seiring waktu. (Listyaningsih & Satiti, 2022)

Kesejahteraan masyarakat di NTB tidak hanya terlihat dari tingkat pendidikan, tetapi juga dari tingkat kemiskinannya yang harus diperhatikan. Kemiskinan adalah masalah yang perlu ditangani, terutama oleh pemerintah daerah, sehingga perlu ada upaya perbaikan di bidang kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di NTB mengalami fluktuasi setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di NTB dari tahun 2013 hingga

2024 cenderung menurun meskipun tidak signifikan. Menghadapi kondisi ini, diperlukan metode untuk memperkirakan apakah jumlah penduduk miskin akan berkurang atau bertambah di masa mendatang. Pertumbuhan ekonomi inklusif meliputi pemerataan, kesetaraan peluang, dan perlindungan dalam pasar dan transisi ketenagakerjaan. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif adalah dengan pembangunan infrastruktur. (HARSONO et al., 2024) Kemiskinan juga dapat menyebabkan konflik dan ketimpangan sosial, menyebabkan krisis ekonomi dan kesejahteraan yang lebih rendah yang merusak persatuan dan kerakyatan. (Mardiah et al., 2024)

Untuk mengetahui apakah kemiskinan akan berkurang atau bertambah di masa depan, diperlukan proses peramalan berdasarkan data jumlah penduduk miskin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah-langkah strategis dengan melaksanakan berbagai program yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan dalam perekonomian daerah. Program-program yang dilakukan meliputi percepatan pengentasan kemiskinan melalui gerakan multipihak, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, pengembangan sektor industrialisasi dan ekonomi kreatif, perluasan kesempatan kerja, pengembangan ekonomi hijau dan biru, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. (Nakyah, Fitratul, Muhammad Alwi, 2024)

status sosial ekonomi rendah menghadapi kendala dalam pemilihan pangan akibat keterbatasan pendapatan, waktu, serta sumber daya rumah tangga dan komunitas. Selain itu, rendahnya pendapatan rumah tangga dan kondisi lingkungan yang tidak memadai di daerah berpendapatan rendah juga mengurangi kesempatan bagi mereka untuk melakukan aktivitas fisik, terutama bagi yang memiliki pekerjaan menetap. (Prasiska et al., 2024).

Beberapa program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB. Di bidang kesehatan, ada program Kartu Indonesia Sehat (KIS); di bidang pendidikan, terdapat Program Indonesia Pintar (PIP); sedangkan di bidang sosial, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, bagi pelaku UMKM, pemerintah memberikan bantuan modal usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program-

program ini telah berjalan selama kurang lebih lima tahun terakhir untuk menurunkan angka kemiskinan, namun belum sepenuhnya menyelesaikan pokok masalahnya. Program ini belum mencapai hasil optimal karena masih terdapat kesenjangan antara rencana dan realisasi kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan. Untuk menanggulangi kemiskinan secara efektif, diperlukan strategi terpadu dan terintegrasi secara sistematis, bukan pendekatan yang terpisah-pisah. Sinergi antar lembaga pemerintah sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara menyeluruh. (Nasri et al., 2024)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *desk-review* dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, yakni pengumpulan data sekunder atau data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya tanpa melakukan survei lapangan, yaitu data jumlah penduduk miskin dari tahun 2013 hingga 2024. Hague dkk (2013) menjelaskan bahwa publikasi data statistik merupakan salah satu sumber data penting bagi penelitian-penelitian dengan metode desk-review (Sayuti & Taqiuddin, 2020). Dengan Data kemiskinan ini digunakan untuk memprediksi dan memahami jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan di NTB untuk tahun-tahun kedepannya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deret waktu (time series), yang di mana data disusun berdasarkan urutan waktu dan dikumpulkan dalam periode tertentu, dan jumlah penduduk yang tergolong miskin di NTB semenjak tahun 2013 hingga 2024. Populasi yang terlibat dalam penelitian ini mencakup seluruh wilayah di NTB. Yaitu wilayah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Bima, dan Dompu (Kustiawan et al., 2024)

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang menampilkan jumlah kemiskinan di setiap daerah di NTB dari tahun 2013 hingga 2024, diperoleh dari situs resmi BPS (Badan Pusat Statistik). (Kusuma et al., 2021). Data ini umumnya berasal dari sumber-sumber seperti laporan penelitian terdahulu, publikasi pemerintah, arsip, survei yang dilakukan oleh

lembaga lain, data statistik resmi, artikel jurnal, buku, atau data yang tersedia secara daring. (Rizka Ridha Aulia et al., 2024).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kemampuan unuk pemenuhan kebutuhan dasar (*Basic needs approach*). pada tingkat pendapatan per kapita yang sama, semakin tidak merata distribusi pendapatan, semakin tinggi pula tingkat kemiskinannya. Sebaliknya, pada distribusi pendapatan yang merata, semakin rendah rata-rata pendapatan, semakin besar pula jumlah penduduk miskin. (RWIGEMA (PhD), 2021) Untuk menentukan apakah tingkat kemiskinan akan meningkat atau menurun di tahun mendatang, diperlukan proses peramalan berdasarkan data jumlah penduduk miskin dari tahun-tahun sebelumnya. Peramalan (forecasting) adalah kegiatan memprediksi kondisi masa depan dengan memanfaatkan data historis yang relevan dan menerapkannya dalam suatu model matematis (Arif Subekti, 2010). Terdapat dua metode dalam peramalan, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif mengandalkan intuisi tanpa menggunakan pendekatan matematis atau statistik, sedangkan metode kuantitatif dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu metode kausal dan metode deret waktu (time series). Salah satu jenis peramalan dengan metode deret waktu adalah peramalan dengan *exponential smoothing*. (Telaumbanua & Nurviana, 2022)

Proses pembangunan dan pengembangan wilayah dapat memengaruhi perubahan struktur ekonomi, yang tercermin dalam kontribusi setiap sektor terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). mewakili data dan analisis kemiskinan di BPS Badan Pusat Statistik masih cukup tinggi sehingga perlu ditingkatkan investasi sebagai kebijakan yang mengakomodir penurunan angka kemiskinan di beberapa wilayah di NTB. (Soegoto et al., 2024)Hal ini terlihat dari perubahan basis struktur ekonomi di Provinsi NTB selama periode 2013 hingga 2024, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini: Dilihat dari data PDRB Provinsi NTB mengalami peningkatan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di Indonesia, karena disebabkan oleh lapangan usaha seperti sektor

perdagangan, sektor pertanian, hotel dan restoran sebagai pendorong utama. (Helmy et al., 2024) Terbatasnya akses untuk pekerjaan yang stabil dan gajinya tinggi adalah salah satu penyebab dari kemiskinan di wilayah NTB, Adanya kerbatasan akses terhadap pekerjaan menyebabkan masyarakat tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil, mengakibatkan sulit meningkatnya kualitas hidup dan mengentasi kemiskinan.(Mardiah et al., 2024)

Tabel 1. Persentase Penduduk miskin di Provinsi NTB Peperiode 2013-2024

KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota (Persen)											CAGR 2024	GROWT 2013- 2024	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Kabupaten Lombok Barat	17.4 3	17.1 1	17.3 8	16.7 3	16.4 6	15.2	15.1	14.2	14.4	13.3	13.6	12.65	-2.87	-287.19
Kabupaten Lombok Tengah	16.2	16.0 3	16.2 6	15.8	15.3 1	13.8	13.6	13.4	13.4	12.8	12.9	12.07	-2.64	-263.99
Kabupaten Lombok Timur	19.1 6	19	19.1 4	18.4 6	18.2 8	16.5	16.1	15.2	15.3	15.1	15.6	14.51	-2.50	-249.55
Kabupaten Sumbawa	17.0 4	16.8 7	16.7 3	16.1 2	15.3 1	14.0	13.9	13.6	13.9	13.5	13.9	12.87	-2.52	-251.92
Kabupaten Dompu	14.2 4	15.4 6	15.1 1	14.2 3	13.4 3	12.4	12.2	12.1	12.6	12.4	12.6	11.59	-1.85	-185.45
Kabupaten Bima	16.2 4	16.0 4	15.7 8	15.3 1	15.1	14.8	14.7	14.4	14.8	14.5	14.3	13.88	-1.42	-141.74
Kabupaten Sumbawa Barat	17.1	16.8 7	16.9 7	16.5	15.9 6	14.1	13.8	13.3	13.5	13.0	12.9	12.23	-3.00	-300.12
Kabupaten Lombok Utara	35.8 8	34.2 7	34.1 3	33.2 1	32.0 6	28.8	29.0	26.9	27.0	25.9	25.8	23.96	-3.60	-360.43
Kota Mataram	10.7 5	10.5 3	10.4 5	9.8	9.55	8.96	8.92	8.47	8.65	8.63	8.62	8	-2.65	-265.03
Kota Bima	9.91	9.74	9.85	9.51	9.27	8.79	8.6	8.35	8.88	8.8	8.67	8.12	-1.79	-179.47
Nusa Tenggara Barat	17.2 5	17.0 5	17.1	16.4 8	16.0 7	14.7	14.5	13.9	14.1	13.6	13.8	12.91	-2.60	-260.02
RATA- RATA													-2.48	-248.49

Sumber; Badan pusat statistik (BPS) NTB (2013-2024)

Persentase penduduk miskin di NTB penurunan yang sangat tinggi khususnya pada tahun 2024 saat ini. Dari kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2024, nilai rata rata CGAR persentase jumlah penduduk miskin yang ada di daerah NTB adalah -2,48% dan nilai rata rata growt mencapai -248,49%. NTB mengalami penurunan yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Yang berarti mengalami peningkatan sebanyak 50% dari tahun 2013 hingga 2024. Persentase penurunan di NTB pada tahun 2013 sebesar 17.25%, pada tahun 2014 sebesar 17.04%, pada tahun 2015 sebesar 17.1%, pada tahun 2016 sebesar 16.48%, pada tahun 2017 sebesar 16.07%, pada tahun 2018 sebesar 14.75, pada tahun 2019 sebesar 14.56%, pada tahun 2020 sebesar 13.97%, pada tahun 2021 sebesar 14.14%, pada tahun 2022 sebesar 13.68%,

pada tahun 2023 sebesar 13.68%, pada tahun 2024 sebesar 12.91%. Dari Persentase penduduk miskin dari tahun 2013 hingga 2024 ini kita bisa melihat, bahwa daerah miskin yang paling tinggi berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan yang rendah berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. (Diep et al., 2024)

Tabel 2: Jumlah Penduduk Miskin Provinsi NTB 2013-2024

KAPUPATEN/ KOTA	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)												CAGR 2013- 2024	GROWT 2013- 2024
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Kabupaten Lombok Barat	110.	110.	113.	110.	110.	103.	105.	100.	105.	99	102.	96.5	-1.26	-
	99	75	3	85	69	77	04	25	24		71	7		125.72
Kabupaten Lombok Tengah	145.	145.	147.	145.	142.	130	128.	128.	131.	128	129.	122.	-1.54	-
	15	18	94	37	14		82	1	94		74	32		154.37
Kabupaten Lombok Timur	219.	219.	222.	216.	215.	196.	193.	183.	190.	189.	197.	185.	-1.54	-
	56	67	19	18	81	87	56	84	84	64	63	03		154.35
Kabupaten Sumbawa	73.7	73.8	73.5	71.6	68.6	63.7	63.4	62.8	66	64.7	67.4	63	-1.43	-
	9	6	7	6	9	7	9	8		3				142.69
Kabupaten Dompu	36.4	36.4	35.9	34.3	32.8	30.7	30.8	30.9	33.2	33.2	34.3	32.0	-1.14	-
		2	4	1	5	4	1	7	6	7	8	8		114.19
Kabupaten Bima	73.8	74.5	73.7	72.3	72.1	71.6	71.9	71.3	75.4	74.4	74.7	72.9	-0.11	-11.27
	3	4	1	6	4	5	5	2	9	6	4	2		
Kabupaten Sumbawa Barat	21.7	22.0	22.5	22.4	22.3	20.3	20.4	20.2	21.5	21.2	21.7	21.1	-0.25	-24.59
	1	4		7	3	6	5		1	8	7	3		
Kabupaten Lombok Utara	72.1	72.1	72.2	71.0	69.2	62.8	63.8	59.8	61.7	59.8	60.1	56.4	-2.21	-
	6	9	8	2	4	6	4	6		2	2	3		221.05
Kota Mataram	46.6	46.6	46.7	44.8	44.5	42.6	43.1	41.8	44.4	45.3	46.2	43.7	-0.59	-58.77
	7	7	6	1	3		9		5			4		
Kota Bima	15.2	15.3	15.7	15.4	15.3	14.8	14.8	14.6	16.2	16.4	16.5	15.8	0.33	32.84
	5	1		2	6	4		6	2	4	3	1		
Nusa Tenggara Barat	815.	816.	823.	804.	793.	737.	735.	713.	746.	731.	751.	709.	-1.26	-
	5	62	89	45	78	46	96	89	66	94	23	01		126.41
RATA-RATA													-0.97	-97.42

Sumber; Badan pusat statistik (BPS) NTB (2013-2024)

Dilihat dari table di atas penduduk yang hidup dalam kemiskinan di NTB mengalami penurunan pada tahun 2018, 2019 dan 2020, namun karena pandemi Covid-19 pada tahun 2021, persentase tersebut naik menjadi 14,14 % . Namun pada tahun 2022 ,NTB Kembali menunjukkan tren yang baik dengan turunnya angka kemiskinan menjadi 13,68 %, dan pada tahun 2024 penurunan kemiskinan di NTB mencapai 12,91%. Meskipun demikian ,melalui berbagai inisiatif yang dapat mendorong perekonomian daerah ,pemerintah NTB harus lebih berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah NTB. Beberapa daerah yang berdekatan memiliki tingkat kemiskinan serupa. Artinya, jika suatu daerah memiliki tingkat

kemiskinan sangat tinggi, daerah sekelilingnya juga memiliki tingkat kemiskinan sangat tinggi, begitupun sebaliknya. Dapat diketahui pula bahwa tingkat kemiskinan sangat tinggi cenderung menyebar hanya di bagian tengah dan timur. (Gabriela & Utomo, 2023)

Dampak Kemiskinan di Ntb

Hasil penelitian yang mengkaji dampak kemiskinan terhadap masyarakat di NTB menunjukkan bahwa kemiskinan mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat lokal. Dampak kemiskinan di NTB dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan, maka apabila jumlah penduduk semakin rendah dapat mengakibatkan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi yang sangat tidak signifikan di wilayah NTB. (Rosyidah et al., 2024)

Keterbatasan Sumber Daya dan Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan di NTB disebabkan oleh keterbatasan sumber daya seperti, terbatasnya akses terhadap infrastruktur, terbatasnya akses terhadap pasar, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang sesuai. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur, misalnya menghambat mobilitas dan distribusi barang, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan usaha lokal. Demikian pula, kurangnya akses pasar membuat produsen lokal sulit untuk menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif, sementara kurangnya pendidikan dan keterampilan membatasi peluang kerja yang lebih baik bagi penduduk.

Kelajuan pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, yang dihitung menggunakan angka PDRB harga konstan, menunjukkan perkembangan nilai pendapatan daerah pada waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan kemajuan dan kecepatan dalam proses pembangunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan penurunan dalam perekonomian daerah tersebut. Di NTB, keterbatasan sumber daya ini tidak hanya memperburuk kondisi kemiskinan akan tetapi juga menekan laju pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dan tanpa adanya infrastruktur yang memadai, pasar yang terjangkau, dan pendidikan yang memadai, sulit bagi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mempercepat

pembangunan dan memberantas tingkat kemiskinan, diperlukan adanya investasi yang signifikan dalam infrastruktur, akses pasar, serta peningkatan pendidikan dan keterampilan.

Terbatasnya Akses Terhadap Pendidikan

Terbatasnya akses terhadap pendidikan yang memadai juga menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan di NTB. Kurangnya akses ini membuat masyarakat tidak mendapatkan kesempatan yang setara untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka, sehingga menghambat peningkatan kualitas hidup dan upaya pengentasan kemiskinan. Pendidikan berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik pula kualitas SDM yang dihasilkan, yang diharapkan dapat membantu individu mendapatkan pekerjaan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Terbatasnya Akses Terhadap Pekerjaan

Terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang stabil dan bergaji tinggi juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di NTB. Terbatasnya akses terhadap pekerjaan menyebabkan masyarakat tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil, sehingga sulit untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi kemiskinan. Dalam penelitian ini kemiskinan di NTB disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan terbatasnya akses terhadap pendidikan, terbatasnya akses terhadap lapangan kerja. Mengatasi kemiskinan di NTB memerlukan strategi yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan lapangan kerja.

Solusi Pemerintah NTB Dalam Menanggulangi Kemiskinan Terhadap Masyarakat

Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengimplementasikan berbagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan pada masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil untuk mengatasinya: 1) Program Pemberdayaan Ekonomi, yaitu dimana pemerintah NTB meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, seperti pelatihan wirausaha, akses ke modal usaha, dan pengembangan produk lokal, yang dimana hal ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, 2)

Bantuan Sosial, penyuluran bantuan sosial ini ditujukan kepada masyarakat masyarakat yang mengalami finansial yang kurang memadai ataupun yang kurang mampu, yang dimana program penyuluran bantuan ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan skunder, Tersier, dan primer, 3) Pembangunan Infrastruktur, peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan akses listrik sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB. Hal ini juga dapat membuka akses ke pasar bagi produk lokal, 4) Sektor Pertanian dan Perikanan, program ini berfokus pada pengembangan sektor pertanian dan perikanan, termasuk bantuan alat dan bibit yang baik, untuk meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani dan nelayan, 5) Pendampingan dan Kolaborasi, pada program pendampingan dan kolaborasi ini pemerintah bekerja sama dengan lembaga lembaga yang tergolong non-pemerintah dan komunitas komunitas lainnya untuk memberikan pendampingan dan advokasi bagi masyarakat masyarakat yang kurang mampu, 6) Pendidikan dan Kesehatan, dalam upaya ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses akses yang berfokus pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang dimana program ini dapat berdampak langsung terhadap masyarakat dan juga terhadap kemampuan mereka untuk keluar dari garis kemiskinan.

Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan masalah yang kompleks, yang tidak hanya berkaitan dengan pendapatan rendah, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan pembangunan yang lebih luas, seperti akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja. Meskipun ada penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan, ketimpangan pendapatan yang tinggi dan keterbatasan sumber daya memperburuk kondisi ini, terutama di wilayah perdesaan. Pemerintah NTB telah mengimplementasikan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan berbasis masyarakat dan pengembangan komoditas unggulan lokal. Untuk merencanakan kebijakan yang lebih efektif, diperlukan peramalan berbasis data untuk memahami tren kemiskinan dan merumuskan solusi yang dapat mengurangi ketimpangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneja, A., Chakraborty, P., & Ritadhi, S. (2024). Globalization Shocks and Ethnic Politics: Evidence from India's Trade Liberalization and the Emergence of Caste-Based Parties. *Ashoka University, Leading Liberal Arts and Sciences University*. <https://www.ashoka.edu.in/research/globalization-shocks-and-ethnic-politics-evidence-from-indias-trade-liberalization-and-the-emergence-of-caste-based-parties/>
- Anugrah, Y. P., & Hasri, D. A. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pad provinsi ntb tahun 2018-2022. 2, 499–508.
- Diep, N. T. B., Le, N. P., Ninh, N. T. H., & Dung, N. M. (2024). National State Budget Expenditure and Human Development Index in Vietnam. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 22(1), 2800–2811. <https://doi.org/10.57239/pjlss-2024-22.1.00207>
- Gabriela, P., & Utomo, A. P. (2023). Analisis Spasial Pengaruh Infrastruktur Sosial Dan Infrastruktur Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pulau Jawa 2021. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1), 407–416. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1672>
- Hardiani. (2013). Dampak Pertumbuhan Sektor Ekonomi Basis Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Paradigma Ekonomika*, 1(7), 51–59. <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/2208/7698>
- Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1337>
- HARSONO, I., SUTANTO, H., ROIS, I., FADLIYANTI, L., & MULAWIANI, B. S. W. (2024). Kontribusi Infrastruktur Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. *Ganec Swara*, 18(1), 196. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.750>
- Helmy, A., Nujum, S., & Selong, A. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Uph Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1), 2024–2907.
- Koja, M. T., Hudang, A. K., & Renggo, Y. R. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1051–1064. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2662>
- Kustiawan, E., Dalimunthe, D. Y., & Oktarianty, H. (2024). PREDICTION OF TIN EXPORTS , POPULATION , POVERTY , AND LABOR FORCE IN THE PROVINCE OF BANGKA. 18(4), 2589–2596.
- Kusuma, F., Ahsan, M., & Syahminan, S. (2021). Prediksi Jumlah Penduduk Miskin Indonesia menggunakan Metode Single Moving Average dan Double Moving Average. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 3(2), 105. <https://doi.org/10.36499/jinrpl.v3i2.4594>
- Listyaningsih, U., & Satiti, S. (2022). Dinamika fertilitas dan prevalensi kontrasepsi di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 153. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.595>
- Mardiah, F., Islami, J., Irawan, M. F., & Pratama, I. N. (2024). Meninjau Dampak Kemiskinan Yang Terjadi Terhadap Masyarakat Kabupaten Dompu. 13.

- Nakyah, Fitratul, Muhammad Alwi, E. A. (2024). Analysis of the Influence of Poverty Levels, Unemployment and Economic Growth on the Human Development Index in Nusa Tenggara Barat Province 2017-2022. *Economy and Finance Enthusiastic*, 2(1), 8–18.
- Nasri, M., Nujum, S., & Arfah, A. (2024). Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(2), 543–555.
- Prasiska, D. I., Chapagain, D. D., Osei, K. M., Rajaguru, V., Kang, S. J., Kim, T. H., Lee, S. G., & Han, W. (2024). Non-communicable comorbidities in pulmonary tuberculosis and healthcare utilization: a cross-sectional study of 2021 Indonesian national health insurance data. *Archives of Public Health*, 82(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s13690-024-01352-y>
- Rizka Ridha Aulia, Wahyunadi, W., & Eka Agustiani. (2024). The Influence of Capital Expenditures and Investment on Economic Growth in West Nusa Tenggara Province 2012-2022. *Economy and Finance Enthusiastic*, 2(1), 17–26. <https://doi.org/10.59535/efe.v2i1.188>
- Rosyidah, D., Saptono, A., & Wibowo, A. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur 2015-2022. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(5), 833–844. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/1860>
- RWIGEMA (PhD), D. P.-C. (2021). Potrait of Developing Economy: Rwanda Perspective. *Strategic Journal of Business & Change Management*, 8(3). <https://doi.org/10.61426/sjbc.v8i3.2053>
- Sayuti, R. H., & Taqiuddin, M. (2020). Performance Analysis of Agriculture Sector in Alleviating Poverty on West. *AGROTEKSOS: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*, 30(April), 11–17.
- Soegoto, D., Wiganepdo, S., & Surdiatno, H. (2024). the Role of Domestic Investment in Poverty Reduction in 11 Provinces in Java, Bali, Ntt, Ntb and Maluku. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 17(2), 57–64. <https://doi.org/10.23969/jrbm.v17i2.12985>
- Telaumbanua, E. F., & Nurviana. (2022). Peramalan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Tamiang Menggunakan Metode Exponential Smoothing. *Jurnal Matematika Dan Terapan*, 4(1), 31–35. <https://mail.ejurnalunsam.id/index.php/jgp/article/view/5516/3528>